

Implementasi E-Buddy Pada Proses Ketatausahaan di Desa Permisan, Jabon

Oleh:

Annisa Cahyaning Nugraeni (222020100190)

Dosen Pembimbing:

Lailul Mursyidah, M.AP

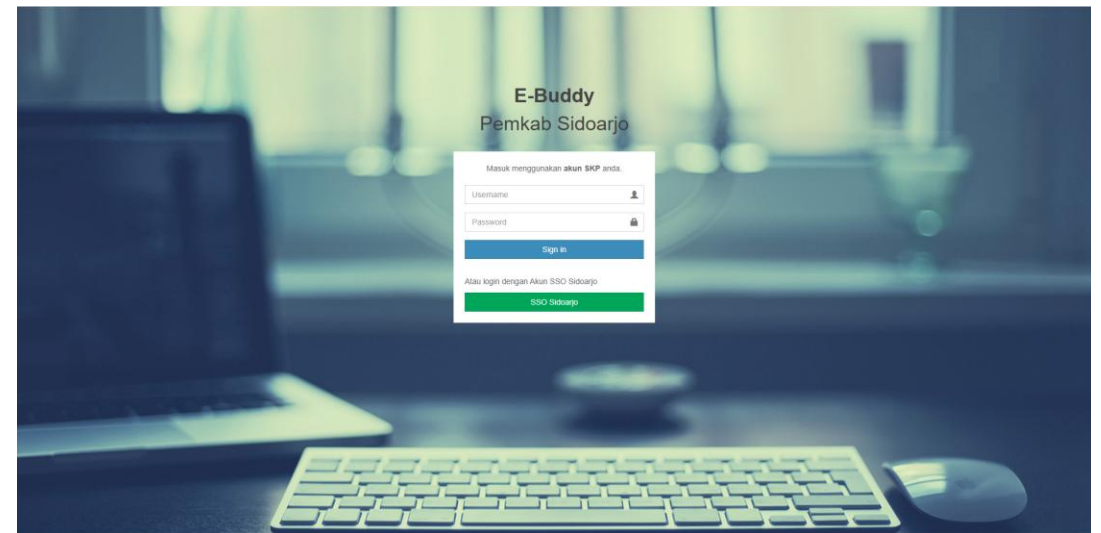
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Februari, 2026

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam tata usaha adalah pengelolaan surat menyurat, yang menjadi sarana komunikasi tertulis antara pihak pengirim dan penerima untuk berbagai tujuan tertentu.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau Information and Communication Technology (ICT) saat ini sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan. E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan tata kelola pemerintahan.

E-Buddy dirancang sebagai tindak lanjut dari penerapan E-Governance G2E (Government to Employee). Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi sebagai platform pengelolaan surat menyurat berbasis digital. Fitur utamanya yakni menu surat masuk, surat keluar, dan presensi.



Pendahuluan

No	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi Surat
1	2020	22	-	22
2	2021	251	65	251
3	2022	301	282	301
4	2023	339	324	339
5	2024	352	225	352
6	2025	98	62	98

Berdasarkan data pengelolaan surat melalui akun E-Buddy di Pemerintah Desa Permisan dari tahun 2020 hingga April 2025, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas surat-menyurat pada aplikasi E-Buddy. Sistem mulai diimplementasikan secara aktif dan konsisten. Keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa implementasi E-Buddy telah mendorong efisiensi dan keteraturan dalam proses ketatausahaan desa.

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah :

Bagaimana Implementasi E-Buddy dalam proses ketatausahaan di pemerintah desa permisan?

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Buddy pada proses ketatausahaan di Pemerintah Desa Permisan. Yang dianalisis berdasarkan empat indikator teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III, 1980 dengan meilai Empat faktor utama :

- komunikasi,
- sumber daya,
- disposisi,
- dan struktur birokrasi.

Teori

Teori yang digunakan peneliti yaitu

Teori implementasi George C. Edward III

- **Komunikasi (Communication)**
Untuk menjelaskan tingkat kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan.
- **Sumber Daya (Resources)**
Mencakup ketersediaan sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- **Disposisi (Disposition)**
Menjelaskan terkait sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
- **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**
Memuat tentang Tata organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif.

Penelitian Terdahulu

- **Albab M.U, et al (2024)** : Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan surat dinas berbasis digital melalui aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Pemerintah Desa Kedungrejo masih menghadapi berbagai kendala diantaranya: terutama kompetensi SDM dan fitur yang kurang memadai
- **Hanifah A. et al., (2024)** : Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E-Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan masih menghadapi kendala dalam konsistensi komunikasi, kendala penggunaan aplikasi E-Buddy oleh aparatur desa.
- **Suryansyah V.A, et al, (2022)** : Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan e-Buddy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan melalui penggunaan e-Buddy telah diterapkan dengan sangat baik.

Metode Penelitian

- Metode** : Deskriptif
- Pendekatan** : Kualitatif
- Teknik Pengumpulan Data** : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
- Teknik Pemilihan Informan** : Purposive Sampling
Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Tata Usaha
- Teknik Analisis Data** : Model Interaktif Miles Huberman
Pengumpulan Data > Pemilihan Data > Penyajian Data > Penarikan Kesimpulan
- Teori yang digunakan** : teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III, 1980)
Empat faktor utama : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- Lokasi Penelitian** : Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Hasil- KOMUNIKASI

Keberhasilan program dinilai dari Implementasi komunikasi antara Developer kepada pelaksana. Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, Terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi

a. Transmisi

Pada aspek transmisi, penyampaian informasi mengenai aplikasi E-Buddy telah dilakukan melalui dua metode, yaitu daring dan luring. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjangkau seluruh pelaksana program secara maksimal dan merata, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh perangkat desa.

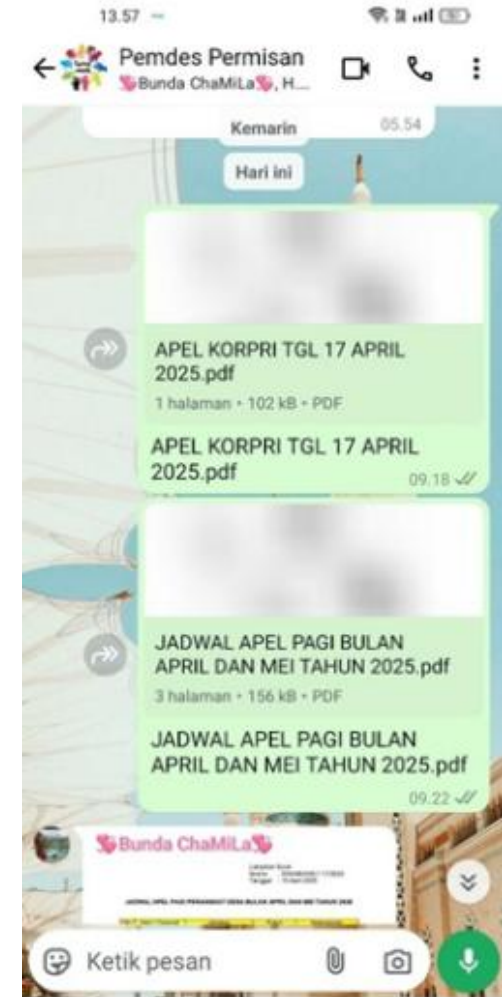
Hasil- KOMUNIKASI

b. Kejelasan

Pada aspek kejelasan, informasi yang disampaikan dinilai sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. Mereka mendapatkan pemahaman tentang cara penggunaan serta fungsi dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi E-Buddy

c. Konsistensi

pada aspek konsistensi, masih ditemukan penggunaan dua saluran komunikasi yang berjalan bersamaan, yaitu E-Buddy dan WhatsApp. Meskipun WhatsApp digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya konsisten



Hasil- SUMBER DAYA

Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, maupun sarana pendukung

No.	Nama	Jabatan
1	Mudjito	Kepala Desa
2	Muhammad Nailul Authon	Sekretaris Desa
3	Yesti Dwi Afriana	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Chamilatus Saadah	Kaur Keuangan
5	Verikah Dwi Windari	Kaur Perencanaan
6	Muhammad Fatihul Iman	K.A. Seksi Pemerintahan
7	Maulidia Khasanah	K.A. Seksi Kesejahteraan
8	Mashudi	K.A. Seksi Pelayanan
9	Yahya	Kasun

a. Sumber daya manusia

Hal ini menjadi indikator bahwa dari sisi sumber daya manusia, baik secara jumlah maupun fungsi, Pemerintah Desa Permisan telah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung implementasi aplikasi digital dalam proses ketatausahaan desa.

Hasil- SUMBER DAYA

No	Jenis Perangkat	Jumlah
1	Monitor LG 24MK400H 24inch	1
2	CPU	1
3	Printer Epson L5190	1

a. Sumber daya sarana dan prasarana

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa permisan untuk menunjang implementasi E-Buddy sudah terbilang cukup memadai.

Hasil- DISPOSISI

Pada aspek disposisi, adalah bagaimana sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan, disposisi menjadi faktor penting karena berkaitan dengan sejauh mana pelaksana memiliki dedikasi dan pemahaman yang sama terhadap tujuan program.

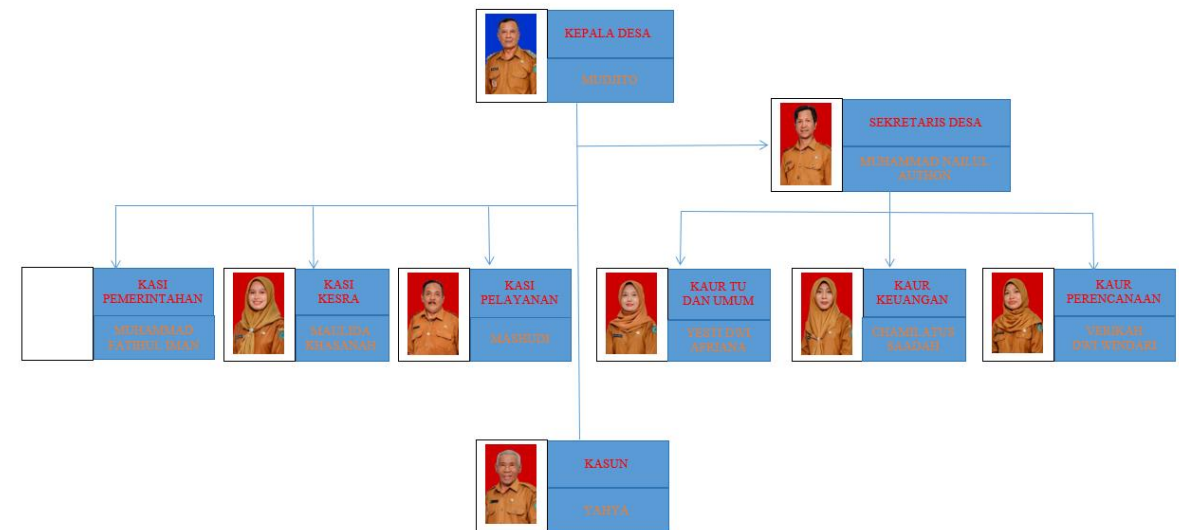
Dalam konteks implementasi di Pemerintah Desa Permisan, Jabon, ditemukan bahwa pelaksanaan disposisi surat melalui aplikasi *e-Buddy* **belum berjalan secara maksimal**. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa **kepala desa tidak selalu aktif mengoperasikan aplikasi tersebut**, sehingga proses disposisi surat masuk tidak sepenuhnya dilakukan secara digital. Akibatnya, Kaur Tata Usaha dan Umum tetap harus melakukan pengajuan disposisi secara manual sebagai alternatif agar surat dapat segera ditindaklanjuti. Kondisi ini menyebabkan terjadinya dualisme proses, yakni melalui *e-Buddy* dan secara manual, yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan tumpang tindih dalam alur kerja.

Hasil- STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi menjadi penting karena berkaitan dengan kejelasan prosedur, pembagian tugas, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan data tersebut, Struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa Permisan menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan sistematis, Fragmentasi yang terlihat dari pembagian peran tersebut memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara lebih fokus, terarah, dan efisien.

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA PERMISAN



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, telah berjalan cukup baik namun masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

Dari aspek komunikasi, sosialisasi sudah dilakukan secara daring dan luring, serta informasi penggunaan aplikasi disampaikan dengan jelas, meskipun masih ditemukan inkonsistensi penggunaan saluran komunikasi karena masih digunakannya WhatsApp sebagai media pendukung.

Dari aspek sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana dinilai sudah memadai.

Pada aspek disposisi, ditemukan bahwa dukungan pelaksana kebijakan, khususnya Kepala Desa, belum maksimal karena disposisi surat masih dilakukan secara manual meski sistem sudah tersedia.

aspek struktur birokrasi, sudah tersusun dengan baik dan dilengkapi SOP yang sesuai regulasi, namun diperlukan penguatan komitmen agar prosedur dijalankan secara konsisten.

Secara keseluruhan, penerapan E-Buddy membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi proses ketatausahaan di desa, namun masih dibutuhkan perbaikan pada beberapa aspek agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] U. Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi. Konsep, Teori dan Dimensi*. 1992.
- [2] L. Marliani, "Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 5, no. 4, pp. 17–21, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1743>.
- [3] E. Junaedi, "Peran Bagian Administrasi Dalam Mengelola Surat Menyurat di Unit Perencanaan PT Jaya Real Property, Tbk.," *Jurnal Sekretari / Administrasi Perkantoran*, vol. 9, no. 2, pp. 133–144, Jun. 2022.
- [4] M. U. Albab and I. F. Agustina, "Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon," 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6205>.
- [5] F. A. Putri, "Peran Arsiparis dalam Pengelolaan Otomasi Arsip di Era Digital," *Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, no. 2, pp. 53–57, 2022.
- [6] A. Nurmandi, D. Kurniasih, Supardal, and A. N. Kasiwi, *Teknologi Informasi Pemerintahan. KAPSIPI*, 2019.
- [7] S. S. Wardiningsih, "Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi," *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 69–78, Apr. 2009.

Referensi

- [8] Rifdan, Haerul, H. Sakawati, and M. N. Yamin, "Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar," *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, vol. 4, no. 1, pp. 49–61, 2024.
- [9] V. A. Suryansyah, I. Murti, and D. Rahmadanik, "Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan E-Buddy," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, no. 5, 2022.
- [10] M. F. Dzulfa, "Efektivitas Penggunaan E-Buddy Dalam Surat-Menyurat Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Suara Politik*, vol. 3, no. 2, pp. 28–35, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.31869/jsp.v3i2.5404>.
- [11] I. G. K. C. B. A. Kusuma, "Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no. 2, pp. 236–248, 2022.
- [12] M. A. Asyafin, D. Virdani, K. D. Kasih, and L. Arif, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya," *Journal Publicuho*, vol. 4, no. 2, pp. 501–510, May 2021, doi: 10.35817/jpu.v4i2.18061.
- [13] Nurlailah, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu," *Jurnal Dinamika*, vol. 1, no. 2, pp. 59–68, 2021, [Online]. Available: <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi->

Referensi

- [14] E. T. Manyo'E, "Analisis Implementasi Kebijakan Pelatihan Pola Satu Pintu dengan Model Edward III di Kabupaten Gorontalo," *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, vol. 2, no. 3, pp. 227–240, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1599>.

